



Pengaruh Inflasi, Harga Kebutuhan Pokok & Upah Minimum (UMK) terhadap Kredit Macet (NPF)

(Studi Empiris Bank Syariah Indonesia di Kota Medan (2021–2025))

Nabilah Irwani ^{1*}, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution ², Nursantri Yanti ³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : nabalahirwani146@gmail.com ¹, mlathiefilhamy@uinsu.ac.id ², nursantriyanti@uinsu.ac.id ³

*Penulis Korespondensi: nabalahirwani146@gmail.com

Abstract. This study aims to examine the effect of inflation, staple commodity prices, and the City Minimum Wage (UMK) on the level of Non-Performing Financing (NPF) at Bank Syariah Indonesia (BSI) in Medan during the 2021–2025 period. A quantitative research approach was employed using secondary data obtained from Statistics Indonesia (BPS), relevant government institutions, and the financial reports of Bank Syariah Indonesia. The data were analyzed using multiple linear regression with EViews 13 software. The findings reveal that inflation and the City Minimum Wage (UMK) do not have a statistically significant effect on Non-Performing Financing. In contrast, staple commodity prices have a negative and significant effect on NPF. Simultaneously, inflation, staple commodity prices, and the City Minimum Wage significantly influence the level of Non-Performing Financing. Furthermore, the coefficient of determination (R^2) of 0.9058 indicates that 90.58% of the variation in NPF can be explained by the three independent variables, while the remaining 9.42% is attributable to other factors outside the scope of this research model.

Keywords: Bank Syariah Indonesia; City Minimum Wage; Inflation; Non-Performing Financing; Staple Commodity Prices.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh inflasi, harga komoditas pokok, dan Upah Minimum Kota (UMK) terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Medan selama periode 2021–2025. Penelitian menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), instansi pemerintah terkait, serta laporan keuangan Bank Syariah Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak EViews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi dan Upah Minimum Kota (UMK) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat NPF. Sebaliknya, harga komoditas pokok memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Secara bersama-sama, ketiga variabel independen tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9058 mengindikasikan bahwa 90,58% variasi NPF mampu dijelaskan oleh inflasi, harga komoditas pokok, dan UMK, sedangkan 9,42% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Kata kunci: Inflasi, Harga Komoditas Pokok, Upah Minimum Kota, Non-Performing Financing, Bank Syariah Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Bank syariah memegang peranan yang sangat krusial dalam struktur perekonomian nasional dengan menjalankan fungsi utama sebagai lembaga perantara keuangan. Melalui mekanisme ini, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan likuiditas dan menyalurkannya kembali kepada sektor riil yang membutuhkan pembiayaan produktif maupun konsumtif. Keberadaan lembaga perbankan syariah yang sehat menjadi fondasi utama bagi terciptanya stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh, mengingat bank merupakan lembaga kepercayaan yang mengelola dana publik. Ketika sebuah bank mengalami penurunan tingkat kesehatan operasional, dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya

terbatas pada internal lembaga perbankan itu sendiri, melainkan dapat menyebar dan merusak kepercayaan masyarakat luas terhadap industri keuangan. Oleh karena itu, tingkat kesehatan perbankan harus senantiasa diukur secara berkala guna memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, serta tetap mematuhi prinsip kehati-hatian operasional perbankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Tabel 1. Perkembangan Rasio NPF BSI di Kota Medan 2021–2025 (dalam persen).

Tahun	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Des
Tahun 2021	3,09	3,09	3,09	3,11	3,11	3,11	3,05	3,05	3,05	2,93	2,93	2,93
Tahun 2022	2,91	2,91	2,91	2,78	2,78	2,78	2,67	2,67	2,67	2,42	2,42	2,42
Tahun 2023	2,36	2,36	2,36	2,31	2,31	2,31	2,21	2,21	2,21	2,08	2,08	2,08
Tahun 2024	2,01	2,01	2,01	1,99	1,99	1,99	1,97	1,97	1,97	1,90	1,90	1,90
Tahun 2025	1,88	1,88	1,88	1,87	1,87	1,87	1,84	1,84	1,84	1,81	1,81	1,81

Sumber: Laporan Keuangan BSI (2025)

Tingkat kesehatan perbankan syariah diukur melalui indikator Non-Performing Financing yang mencerminkan besarnya risiko pembiayaan bermasalah. Berdasarkan data Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Kota Medan periode 2021 hingga 2025, rasio tersebut mengalami penurunan secara bertahap. Pada Januari 2021, rasio tercatat sebesar 3,09% dan turun menjadi 2,93% pada Desember 2021. Selama tahun 2022, rasio bergerak dari 2,91% di bulan Januari hingga mencapai 2,42% pada bulan Desember. Penurunan terus berlanjut sepanjang tahun 2023 dari angka 2,36% pada Januari menjadi 2,08% pada Desember. Memasuki tahun 2024, angka tersebut berada di posisi 2,01% pada Januari dan 1,90% pada Desember. Pada tahun 2025, tingkat rasio dibuka sebesar 1,88% di bulan Januari dan ditutup pada posisi 1,81% di Desember. Tren penurunan ini menandakan adanya peningkatan kualitas penyaluran pembiayaan di wilayah Medan secara berkesinambungan (PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 2025).

Tabel 2. Tingkat Inflasi Kota Medan 2021–2025 (dalam persen).

Tahun	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Oktober	Nov	Des
Tahun 2021	0,38	-0,33	-0,03	0,04	0,24	0,03	0,31	-0,10	0,31	-0,05	0,46	0,44
Tahun 2022	1,04	-0,28	0,68	0,43	0,76	1,39	0,27	-0,25	0,98	-0,47	-0,13	1,54
Tahun 2023	0,86	-0,38	-0,30	-0,20	0,24	0,29	0,28	-0,06	0,38	-0,04	0,49	0,60
Tahun 2024	0,52	0,36	0,73	-0,03	0,59	-0,45	-0,64	-0,20	-0,17	0,10	0,49	0,80
Tahun 2025	0,02	-0,79	0,65	1,31	-0,48	-0,07	0,58	1,18	0,58	-0,05	-0,15	1,54

Sumber: BPS (2025)

Perkembangan indikator makroekonomi lokal di Kota Medan ditandai oleh dinamika fluktuasi laju inflasi bulanan yang sangat variatif sepanjang rentang 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, inflasi dibuka sebesar 0,38% di bulan Januari, sempat menyentuh deflasi -0,33% pada Februari, lalu ditutup 0,44% di Desember. Lonjakan tekanan harga terhitung cukup signifikan pada tahun 2022, di mana inflasi bulanan melonjak ke angka 1,39% pada Juni dan ditutup tinggi sebesar 1,54% pada Desember. Pergerakan relatif mereda selama rentang tahun

2023 dengan kisaran antara -0,38% hingga 0,60%. Pada tahun 2024, tingkat inflasi berkisar dari deflasi -0,64% di bulan Juli hingga 0,80% pada Desember. Sementara itu pada tahun 2025, lonjakan kembali tercatat sebesar 1,31% pada April dan diakhiri sebesar 1,54% pada Desember. Fluktuasi ini memengaruhi daya beli masyarakat secara berkala (Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2025).

Tabel 3. Harga Kebutuhan Pokok di Kota Medan 2021–2025 (dalam Rupiah).

Tahun	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Des
Tahun 2021	77.050	77.050	77.050	77.050	77.050	77.050	77.050	77.050	77.050	77.050	77.050	77.050
Tahun 2022	77.050	77.050	78.450	78.450	78.450	78.350	78.350	78.350	78.350	78.350	79.550	79.550
Tahun 2023	80.950	85.150	83.300	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	87.050	88.900	88.900	90.150
Tahun 2024	90.650	92.600	92.350	92.150	92.150	92.150	92.200	92.200	92.200	92.200	91.950	91.950
Tahun 2025	93.400	93.400	93.400	93.400	94.250	95.300	95.300	96.950	96.600	96.000	96.000	96.000

Sumber: Kota Medan dalam Angka (2025)

Selain tingkat inflasi, beban biaya hidup masyarakat secara konkrit tercermin dari perkembangan harga kebutuhan pokok di Kota Medan yang mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2021, rata-rata harga barang kebutuhan pokok berada stabil pada angka Rp77.050. Pada tahun 2022, harga mulai merambat naik hingga menyentuh kisaran Rp79.550 di bulan Desember. Lonjakan harga yang lumayan substansial terjadi sepanjang tahun 2023, di mana indeks harga bergerak naik dari Rp80.950 pada Januari hingga menembus angka Rp90.150 pada Desember. Tren kenaikan berlanjut selama tahun 2024 berada pada rentang harga Rp90.650 hingga Rp92.600. Memasuki tahun 2025, biaya bahan pokok mencatatkan rekor tertinggi sebesar Rp96.950 pada bulan Agustus sebelum akhirnya berada pada angka Rp96.000 di bulan Desember. Kondisi kenaikan ini berdampak langsung terhadap beban pengeluaran riil rumah tangga (Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2025).

Tabel 4. Tren Upah Minimum Kota Medan 2021–2025.

Tahun	UMK (Rupiah)
Tahun 2021	3.329.867
Tahun 2022	3.370.645
Tahun 2023	3.624.118
Tahun 2024	3.769.082
Tahun 2025	4.014.072

Sumber: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (2024)

Guna mengimbangi peningkatan biaya hidup tersebut, Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan penetapan Upah Minimum Kota Medan yang terus mengalami penyesuaian nominal dari Rp3.329.867 pada tahun 2021, naik menjadi Rp3.370.645 pada 2022, meningkat menjadi Rp3.624.118 pada 2023, menjadi Rp3.769.082 pada 2024, hingga

akhirnya mencapai Rp4.014.072 pada 2025. Berdasarkan kerangka Teori Informasi Asimetris dan Hipotesis Pendapatan Permanen, kenaikan harga bahan pokok seharusnya mengikis pendapatan riil masyarakat serta meningkatkan risiko kemacetan kredit. Namun, terdapat kesenjangan fenomena empiris yang sangat menarik di Bank Syariah Indonesia Kota Medan. Meskipun inflasi mengalami fluktuasi tajam dan harga komoditas pangan terus membumbung tinggi, rasio NPF justru menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari 3,09% menjadi 1,81%. Anomali hubungan antara indikator makroekonomi, pengeluaran rumah tangga, dan kualitas pembiayaan ini menuntut pengujian secara empiris dan komprehensif lebih lanjut (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2024).

Sejumlah kajian empiris terdahulu telah secara mendalam menguji pengaruh berbagai variabel makroekonomi terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah. Hasil penelitian Afrila (2025) serta Thoyyibah dan Amir (2024) menemukan bahwa laju inflasi memberikan pengaruh signifikan terhadap kenaikan NPF perbankan syariah. Temuan tersebut sejalan dengan studi Irmayana (2022) yang menyatakan bahwa inflasi secara parsial berdampak signifikan terhadap NPF, sedangkan variabel keuangan lain tidak. Penelitian Sari dan Nugroho (2021) mengidentifikasi bahwa kenaikan tingkat inflasi menekan daya beli masyarakat sehingga mendorong risiko gagal bayar nasabah. Selanjutnya, Putri dan Hidayat (2023) membuktikan bahwa kombinasi variabel makroekonomi berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah. Lebih spesifik, Rahman dan Yusuf (2024) menguraikan bahwa tekanan ekonomi akibat lonjakan harga bahan pokok merupakan faktor dominan yang memicu penurunan kapasitas membayar utang nasabah perbankan syariah secara langsung (Rahman & Yusuf, 2024).

Meskipun riset mengenai NPF telah banyak dilakukan, sebagian besar studi terdahulu masih berfokus pada variabel makroekonomi konvensional seperti suku bunga BI atau pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini hadir secara spesifik untuk mengisi celah literatur dengan mengintegrasikan variabel harga kebutuhan pokok dan Upah Minimum Kota bersama inflasi dalam menganalisis NPF pada PT Bank Syariah Indonesia di Kota Medan periode Januari 2021 hingga Desember 2025. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji serta menganalisis pengaruh inflasi, harga bahan pokok, dan UMK secara parsial maupun simultan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah. Hasil pengujian empiris ini diharapkan memberikan kontribusi akademis bagi literatur perbankan syariah serta menjadi acuan praktis dalam merumuskan kebijakan manajemen risiko pembiayaan yang berkelanjutan. Hubungan antarvariabel dalam kerangka pemikiran penelitian ini disajikan secara sistematis melalui bagan kerangka konseptual berikut ini (Mubarok et al., 2026).

2. TINJAUAN TEORITIS

Non-Performing Financing (NPF)

Non-Performing Financing (NPF) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kualitas aset produktif serta tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Secara konseptual, rasio NPF menggambarkan perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah. Kualitas pembiayaan perbankan syariah diklasifikasikan ke dalam lima tingkatan kolektibilitas, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Indikator pembiayaan bermasalah yang masuk dalam perhitungan NPF mencakup akumulasi pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Nilai rasio NPF yang semakin tinggi mencerminkan buruknya kualitas pembiayaan serta berpotensi mengganggu likuiditas dan profitabilitas bank. Sebaliknya, rasio NPF yang rendah mengindikasikan bahwa manajemen risiko pembiayaan berjalan secara efektif serta portofolio aset bank berada dalam kondisi sehat (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang berdampak pada penurunan daya beli mata uang. Secara makroekonomi, laju inflasi mencerminkan tingkat ketidakstabilan moneter yang berpotensi mengganggu perencanaan keuangan sektor rumah tangga maupun pelaku usaha. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), yang merekam perubahan harga dari sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara periodik. Tingkat inflasi diukur melalui indikator laju perubahan IHK bulanan (*month-to-month*) dan tahunan (*year-on-year*), serta perubahan daya beli riil masyarakat. Ketika tingkat inflasi melonjak tinggi, pendapatan riil masyarakat akan tergerus, yang pada akhirnya menurunkan alokasi anggaran untuk kewajiban membayar utang dan meningkatkan risiko gagal bayar perbankan (Sari & Nugroho, 2021).

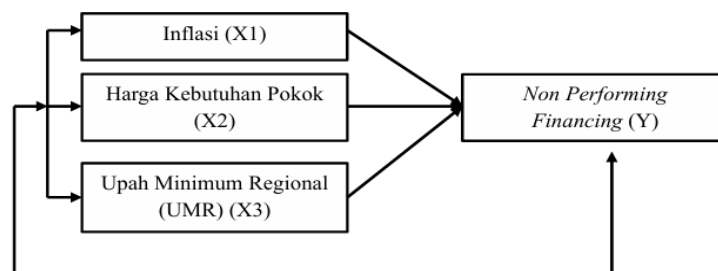
Harga Kebutuhan Pokok

Harga kebutuhan pokok merupakan cerminan langsung dari dinamika biaya hidup primer yang harus ditanggung oleh sektor rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar harian. Kebutuhan pokok mencakup komoditas pangan strategis yang memiliki tingkat elastisitas permintaan yang sangat rendah atau bersifat inelastis, seperti beras, minyak goreng, gula, daging, dan telur. Indikator pengukuran harga kebutuhan pokok dinilai berdasarkan indeks harga gabungan komoditas pangan pokok bulanan, porsi belanja kebutuhan primer terhadap total pendapatan rumah tangga, serta laju perubahan nominal pengeluaran riil

konsumsi dasar. Karena sifatnya yang relatif sulit dikurangi atau digantikan, kenaikan harga kebutuhan pokok secara langsung menekan struktur anggaran rumah tangga. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk memprioritaskan konsumsi pangan utama dan mengorbankan porsi pengeluaran non-makanan, termasuk pemenuhan kewajiban angsuran pembiayaan pada perbankan syariah (Rahman & Yusuf, 2024).

Upah Minimum Kota (UMK)

Upah Minimum Kota (UMK) merupakan kebijakan jaring pengaman sosial di bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah guna menjamin agar pekerja menerima pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Penetapan UMK dilakukan secara periodik setiap tahun dengan memperhitungkan berbagai indikator ekonomi utama, seperti tingkat inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi lokal, serta Indeks Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi pekerja. Indikator penentu UMK meliputi nominal ketetapan upah minimum tahunan, tingkat pertumbuhan/persentase kenaikan upah dibanding tahun sebelumnya, serta nilai riil upah terhadap laju kenaikan harga barang. Peningkatan nominal UMK secara teoritis berfungsi memperkuat kapasitas pendapatan riil masyarakat, meningkatkan daya beli, serta memperkuat jaminan kemampuan finansial nasabah dalam melunasi kewajiban angsuran pembiayaan secara tepat waktu (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2024).



Gambar 1. Kerangka Konseptual.

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan pendekatan kuantitatif berdesain asosiatif kausal guna menganalisis pengaruh tingkat inflasi, dinamika harga kebutuhan pokok, serta Upah Minimum Kota (UMK) terhadap rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pemilihan pendekatan kuantitatif didasarkan pada kebutuhan pengujian empiris terhadap hubungan sebab-akibat antarvariabel melalui pemodelan ekonometrika berbasis data numerik. Penelitian ini memanfaatkan data deret waktu (*time series*) berskala bulanan dari

Januari 2021 hingga Desember 2025, sehingga menghasilkan total 60 sampel observasi ($N = 60$). Penentuan variabel didasari oleh pijakan teoritis bahwa pergeseran indikator makroekonomi serta kapasitas pendapatan masyarakat memengaruhi tingkat likuiditas nasabah dalam melunasi kewajiban pembiayaan, yang pada akhirnya memicu fluktuasi rasio pembiayaan bermasalah perbankan.

Tabel 5. Definisi Operasional.

Variabel	Definisi Operasional	Satuan	Skala	Sumber Data
Pembiayaan Bermasalah (Y)	Rasio Kredit Macet (NPF) bulanan Bank Syariah Indonesia selama periode Januari 2021–Desember 2025.	Persen (%)	Perbandingan	Bank Syariah Indonesia (2025)
Inflasi (X1)	Tingkat inflasi bulanan Kota Medan selama periode Januari 2021–Desember 2025.	Persen (%)	Perbandingan	Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan (2025)
Harga Kebutuhan Pokok (X2)	Harga kebutuhan pokok bulanan di Kota Medan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan untuk periode Januari 2021–Desember 2025.	Rupiah Indonesia (IDR)	Perbandingan	Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan (2025)
Upah Minimum Kota (X3)	Upah Minimum Kota (UMK) Kota Medan, yang ditetapkan setiap tahun oleh Gubernur Sumatera Utara, diterapkan sebagai nilai bulanan untuk setiap tahun yang bersangkutan agar sesuai dengan frekuensi bulanan variabel lainnya.	Rupiah Indonesia (IDR)	Perbandingan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (2025)

Sumber: Data Diolah Penulis (2026)

Pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang dipublikasikan oleh instansi-instansi resmi. Indikator laju inflasi dan perkembangan harga komoditas pangan diperoleh melalui publikasi berkala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan. Nilai ketetapan UMK dihimpun dari Keputusan Gubernur Sumatera Utara, sedangkan data rasio NPF diekstrak dari laporan keuangan resmi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui metode dokumentasi dengan merekapitulasikan catatan statistik, laporan keuangan bulanan, serta berkas regulasi pemerintah yang relevan. Penggunaan data sekunder dipilih karena terstruktur secara sistematis, memiliki kredibilitas dan validitas yang tinggi, serta memenuhi prasyarat pengujian ekonometrika deret waktu.

Prosedur pemodelan data diestimasi menggunakan bantuan perangkat lunak EViews 13 melalui analisis regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression*). Persamaan ekonometrika dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots \dots \dots (i)$$

Keterangan:

1. Y_t = Rasio Non-Performing Financing (NPF) pada periode bulan ke-t
2. X_{1t} = Tingkat inflasi bulanan pada periode ke-t
3. X_{2t} = Harga kebutuhan pokok bulanan pada periode ke-t

4. X_{3t} = Upah Minimum Kota (UMK) Medan pada periode ke-t
5. β_0 = Konstanta (intercept)
6. $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
7. ε_t = Suku pengganggu (error term) pada periode ke-t

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, karakteristik data terlebih dahulu digambarkan melalui analisis statistik deskriptif guna mengetahui nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan deviasi standar dari setiap variabel. Selanjutnya, guna memastikan parameter estimasi regresi bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), pengujian asumsi klasik dijalankan secara menyeluruh. Tahapan uji mencakup uji normalitas residual dengan metode Jarque–Bera, uji multikolinearitas melalui evaluasi nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), uji heteroskedastisitas dengan pengujian White, serta uji autokorelasi memanfaatkan uji korelasi serial Breusch–Godfrey LM. Setelah seluruh asumsi OLS terpenuhi, pembuktian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengevaluasi pengaruh parsial tiap variabel bebas terhadap NPF, uji F untuk mengukur pengaruh simultan seluruh variabel independen, serta koefisien determinasi (*Adjusted R*²) guna menilai seberapa besar variasi fluktuasi NPF mampu dijelaskan oleh model regresi yang dibentuk.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif memberikan informasi tentang nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, dan simpangan baku dari setiap variabel penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.

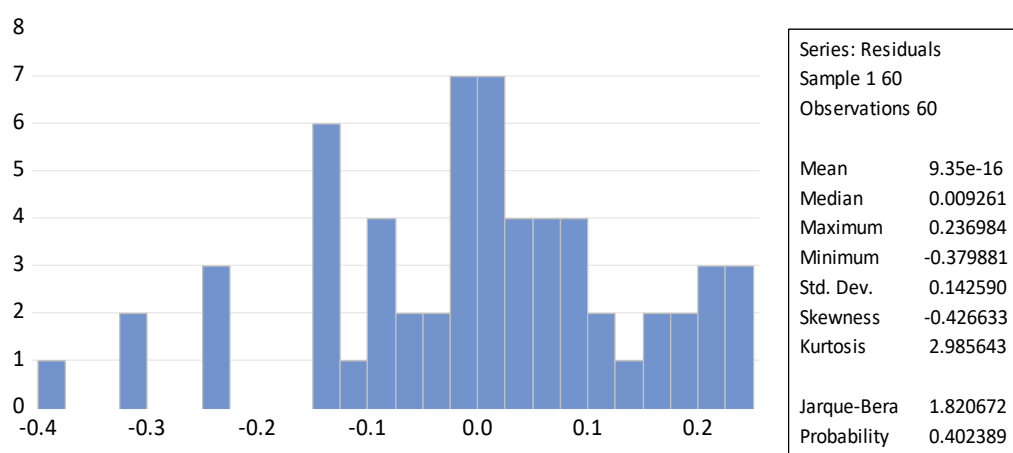
	X1(%)	X2(Rp)	X3(Rp)	Y(%)
Berarti	0,271	85.567,50	3.621.557,00	2.360
Median	0,275	84.000,00	3.624.118,00	2.260
Maksimum	1.540	96.950,00	4.014.072,00	3.110
Minimum	-0,790	77.050,00	3.329.867,00	1.810
Standar Deviasi	0,534	7.343.369	256.658,40	0,465
Kecondongan	0,466	0,085	0,280	0,404
Kurtosis	2.819	1.343	1.688	1.6091
Jarque-Bera	2.251	6.939	5.087	6.471
Kemungkinan	0,324	0,031	0,079	0,039
Jumlah	16.240	5.134.050,00	217.293.420,00	141.570
Jumlah Kuadrat				
Deviasi	16.848	3.180.000.000,00	3.890.000.000.000,00	12.735
Pengamatan	60	60	60	60

Sumber: Hasil Output Eviews 13, (2026)

Berdasarkan Tabel 6, penelitian ini menggunakan 60 observasi yang terdiri dari data bulanan untuk periode Januari 2021 hingga Desember 2025. Variabel inflasi memiliki rata-rata 0,271% dengan rentang nilai Rasio kredit macet (NPF) berkisar antara -0,790% hingga 1,540%, sedangkan rasio kredit macet rata-ratanya adalah 2,360% dengan kisaran 1,810% hingga 3,110%. Harga rata-rata kebutuhan pokok tercatat sebesar Rp 85.567,50 dengan nilai minimum Rp 77.050,00 dan maksimum Rp 96.950,00, sedangkan rata-rata Upah Minimum Kota (UMK) adalah Rp 3.621.557,00 dengan kisaran Rp 3.329.867,00 hingga Rp 4.014.072,00. Deviasi standar setiap variabel relatif kecil dibandingkan dengan kisaran nilai yang diamati, menunjukkan bahwa variasi data selama periode penelitian bersifat moderat. Secara umum, statistik deskriptif memberikan gambaran awal tentang karakteristik data sebelum menguji asumsi klasik dan memperkirakan model regresi.

Tes Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data residual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas merupakan prasyarat dalam analisis regresi linier, yang bertujuan untuk memastikan bahwa residual yang dihasilkan oleh model memiliki distribusi yang mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode Jarque-Bera (Uji JB) dengan menggunakan aplikasi EViews 13. Hasil uji normalitas data residual dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Residual.

Sumber: Hasil Output EViews 13, 2026

Berdasarkan Gambar 2, model regresi residual memenuhi asumsi normalitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,402389, yang menunjukkan tidak adanya penyimpangan dari distribusi normal residual. Temuan ini didukung oleh histogram residual, yang membentuk pola menyerupai kurva normal dengan nilai skewness sebesar -0,426633 dan kurtosis sebesar 2,985643, yang mendekati karakteristik distribusi normal.

Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, model regresi ini cocok untuk menguji hipotesis dan memperkirakan parameter tanpa indikasi bias yang disebabkan oleh distribusi residual yang tidak normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas.

Variabel	Koefisien Perbedaan	Tidak terpusat VIF	Terpusat VIF
C	0,094198	263.8466	NA
X3	8.29E-14	3061.906	1.504780
X2	1.01E-10	2.092.869	1.504811
X1	0,001272	1.261056	1.000122

Sumber: Hasil Output EViews 13, 2026

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF yang terpusat. Nilai tersebut jauh di bawah ambang batas yang umum digunakan, yang berkisar antara 1,000 hingga 1,505. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi linier yang tinggi antara variabel independen, sehingga masalah multikolinearitas bukanlah hambatan dalam model estimasi. Dengan memenuhi asumsi ini, parameter regresi yang diestimasi menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS) dapat menghasilkan koefisien yang stabil, efisien, dan tepat yang mampu menguji pengaruh setiap variabel terhadap rasio Kredit Macet (NPF).

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji White).

Tes Heteroskedastisitas: Putih Hipotesis nol: Homoskedastisitas			
Statistik F	2.250338	Probabilitas F(9,50)	0,0636
Observasi*R-kuadrat	17.29722	Probabilitas Chi-Square(9)	0,0743
Skala menjelaskan SS	14.95964	Probabilitas Chi-Square(9)	0,0921

Sumber: Hasil Output EViews 13, 2026

Hasil uji White menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas. Nilai probabilitas untuk statistik Obs*R-squared adalah 0,0743, dan statistik F serta Scaled Prepared SS semuanya berada di atas tingkat signifikansi, menunjukkan bahwa varians residual konstan. Oleh karena itu, tidak ada indikasi heteroskedastisitas yang dapat memengaruhi efisiensi estimasi koefisien regresi atau validitas uji statistik dalam model.

Tes Autokorelasi

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi (Uji Korelasi Serial Breusch-Godfrey LM).

Statistik F	82.42657	Probabilitas F(2,54)	0,2970
Observasi*R-kuadrat	45.19555	Probabilitas Chi-Square(2)	0,2553

Sumber: Hasil Output EViews 13, 2026

Berdasarkan Tabel 9, hasil uji autokorelasi menggunakan Uji Korelasi Serial Breusch-Godfrey LM menunjukkan nilai Probabilitas Chi-Square sebesar 0,2553. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji Breusch-Godfrey adalah jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak mengalami autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka model regresi mengalami autokorelasi.

Nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,2553 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,2553 > 0,05$). Nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,2970 juga lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara residual pada periode saat ini dan residual pada periode sebelumnya.

Pengujian ini menunjukkan bahwa residual dalam model regresi bersifat independen di seluruh periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi independensi residual, suatu persyaratan dalam analisis regresi linier.

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Probabilitas Chi-Square sebesar $0,2553 > 0,05$. Asumsi klasik autokorelasi telah terpenuhi sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini cocok untuk dilanjutkan ke tahap analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menentukan pengaruh variabel independen, yaitu inflasi (X_1), harga kebutuhan pokok (X_2), dan Upah Minimum Kota (UMK) (X_3) terhadap variabel dependen, yaitu Kredit Macet (NPF) (Y). Analisis ini juga digunakan untuk menentukan arah hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil estimasi menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS) menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 7.624609 - 0.006527X_1 - 0.000055X_2 - 0.000000154X_3$$

Secara umum, semua variabel independen memiliki koefisien regresi negatif, yang menunjukkan bahwa peningkatan inflasi, harga kebutuhan pokok, dan Upah Minimum Kota (UMK) cenderung diikuti oleh penurunan rasio Kredit Macet (NPWP), dengan asumsi variabel lain tetap konstan (*ceteris paribus*). Namun, arah hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi tidak selalu mencerminkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Berdasarkan hasil estimasi, hanya variabel harga kebutuhan pokok yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPWP, sedangkan inflasi dan UMK memiliki koefisien negatif tetapi tidak signifikan. Oleh karena itu, interpretasi ekonometrik pengaruh masing-masing variabel

didasarkan pada hasil pengujian hipotesis melalui uji parsial (uji-t), sedangkan validitas model secara keseluruhan dievaluasi melalui uji simultan (uji-F) dan koefisien determinasi (R^2).

Uji-t (Sebagian)

Tabel 10. Hasil Tes Parsial (Tes-t).

Variabel	Koefisin	Kesalahan Standar	Statistik t	Kemungkina n.
C	7.624609	0.306917	24.84258	0,0000
X3	-1.54E-07	2.88E-07	-0,535135	0,5947
X2	-5.50E-05	1.01E-05	-5.462988	0,0000
X1	-0,006527	0,035660	-0,183023	0,8554

Sumber: Hasil Output EViews 13, 2026

Berdasarkan Tabel 10, hasil uji parsial menunjukkan bahwa inflasi memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,006527, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF) ($p = 0,8554$). Temuan ini menunjukkan bahwa inflasi selama periode observasi tidak mampu menjelaskan secara empiris perubahan pada NPF. Oleh karena itu, perubahan tingkat inflasi bukanlah penentu utama masalah pembiayaan di Bank Syariah Indonesia selama periode penelitian.

Variabel "harga kebutuhan pokok" memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,000055 dan merupakan satu-satunya variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF ($p < 0,001$). Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan harga kebutuhan pokok berhubungan secara signifikan dengan perubahan tingkat masalah pembiayaan setelah mengontrol inflasi dan upah minimum (MSE). Secara ekonometrik, variabel ini memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan variasi NPF selama periode pengamatan.

Sementara itu, Upah Minimum Kota (UMK) juga menunjukkan koefisien regresi negatif, namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik ($p = 0,5947$). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada MSE tidak mampu menjelaskan secara empiris variasi pada NPF. Dengan demikian, peningkatan UMK selama periode penelitian tidak dapat dianggap sebagai faktor yang secara langsung mempengaruhi tingkat masalah pembiayaan di Bank Syariah Indonesia.

Tes Serentak (Tes F)

Tabel 11. Hasil Tes Serentak (Tes F).

R-kuadrat	0.905802
R-kuadrat yang disesuaikan	0.900756
SE regresi	0.146359
Jumlah kuadrat residual	1.199580
Log likelihood	32.23487
Statistik F	179.4978
Probabilitas (statistik F)	0,000000

Sumber: Hasil Output EViews 13, 2026

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa inflasi, harga kebutuhan pokok, dan Upah Minimum Kota (UMK) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Kredit Macet (NPA). Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan NPA dipengaruhi oleh kombinasi kondisi makroekonomi dan faktor pendapatan masyarakat, sehingga model estimasi mampu menjelaskan hubungan ini secara memadai. Koefisien determinasi yang tinggi juga menunjukkan bahwa sebagian besar variasi NPA dapat dijelaskan oleh variabel ketiga dalam model, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, sebesar 9,42%.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).

R-kuadrat	0.905802	Variabel dependen rata-rata	2.359500
R-kuadrat yang disesuaikan	0.900756	variabel dependen SD	0,464588
SE regresi	0.146359	Kriteria informasi Akaike	-0,941162
Jumlah kuadrat residu	1.199580	Kriteria Schwarz	-0.801539
Log likelihood	32.23487	Kriteria Hannan-Quinn	-0,886548
Statistik F	179.4978	Statistik Durbin-Watson	2.014852
Probabilitas (statistik F)	0,000000		

Sumber: Hasil Output EViews 13, 2026

Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa model memiliki daya penjelas yang sangat baik dalam menjelaskan variasi Pembiayaan Bermasalah (NPF). Nilai Adjusted R-squared, yang relatif dekat dengan R-squared, menunjukkan bahwa kemampuan model tetap stabil setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen, sehingga model tidak mengalami penurunan daya prediksi yang signifikan. Dengan demikian, inflasi, harga kebutuhan pokok, dan Upah Minimum Kota (UMK) merupakan determinan yang relevan dalam menjelaskan perubahan NPF selama periode penelitian. Sementara itu, variasi NPF yang tidak dapat dijelaskan oleh model mencerminkan pengaruh faktor lain di luar penelitian, seperti kebijakan pembiayaan, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan karakteristik internal lembaga keuangan.

Pembahasan

Pengaruh Inflasi terhadap Kredit Macet (NPF)

Berdasarkan hasil pengujian regresi parsial, variabel inflasi terbukti tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan rasio *Non-Performing Financing (NPF)* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Kota Medan sepanjang periode observasi tahun 2021 hingga 2025. Hasil analisis data menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,8554, yang berada jauh di atas ambang batas toleransi 0,05, sehingga hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini secara resmi ditolak. Secara teoritis, kenaikan tingkat inflasi seharusnya menggerus daya beli riil masyarakat dan mengurangi alokasi dana nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan. Namun, fenomena empiris pada lokasi penelitian

memperlihatkan situasi yang berbeda, di mana pergerakan laju inflasi daerah selama rentang waktu lima tahun tersebut masih tergolong relatif stabil dan terkendali, sehingga tidak menimbulkan tekanan finansial yang cukup parah bagi kapasitas pengembalian dana nasabah.

Ketidakberadaan pengaruh signifikan ini tidak sejalan dengan hasil riset terdahulu yang dilakukan oleh Afrila (2025) serta Irmayana (2022), yang keduanya menyimpulkan bahwa inflasi secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fluktuasi *NPF* pada perbankan syariah. Disparitas hasil penelitian ini ditengarai muncul akibat perbedaan rentang waktu pengamatan, variasi karakteristik sampel nasabah, serta kondisi pemulihan ekonomi kawasan yang khas di Kota Medan. Temuan ini menegaskan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia Kota Medan selama periode tersebut lebih dominan dipengaruhi oleh faktor internal nasabah dan efektivitas kebijakan manajemen risiko pembiayaan bank, seperti ketatnya proses *underwriting* serta pemantauan kolektibilitas. Dengan demikian, indikator inflasi umum tidak tepat apabila dijadikan sebagai pendorong tunggal atau acuan utama untuk memprediksi perubahan risiko kemacetan pembiayaan pada perbankan syariah di daerah ini.

Pengaruh Harga Kebutuhan Pokok terhadap Kredit Macet (NPF)

Berbeda dengan indikator inflasi, hasil pengujian regresi parsial menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rasio *Non-Performing Financing (NPF)*. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05, serta didukung oleh nilai hitung statistik *t* sebesar 5,462988, sehingga hipotesis kedua diterima. Temuan ini membuktikan bahwa pergeseran harga barang pangan dasar di Kota Medan memberikan dampak yang sangat nyata terhadap pergerakan kualitas aset produktif bank. Sebagai komponen pengeluaran terbesar dalam anggaran rumah tangga, lonjakan harga bahan pokok berpengaruh langsung terhadap penataan prioritas belanja masyarakat. Bukti empiris ini memperkuat penelitian Rahman dan Yusuf (2024) yang menyatakan bahwa beban pengeluaran pangan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi stabilitas pembayaran kewajiban finansial masyarakat pada era *pasca-pandemi*, di mana tekanan perekonomian riil terasa jauh lebih menekan dibanding indikator makro umum.

Meskipun pengujian menunjukkan signifikansi yang sangat kuat, koefisien regresi bernilai negatif mengindikasikan bahwa peningkatan harga kebutuhan pokok justru diiringi oleh penurunan rasio *NPF* pada lokasi penelitian. Arah hubungan ini bertolak belakang dengan asumsi teoritis konvensional yang menyatakan bahwa kenaikan biaya hidup akan senantiasa meningkatkan risiko kredit macet karena anggaran masyarakat terserap untuk konsumsi primer. Fenomena unik ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor pendukung selama rentang

tahun 2021 hingga 2025, antara lain adanya tren pemulihan pendapatan riil masyarakat, efektivitas program restrukturisasi pembiayaan yang diluncurkan oleh Bank Syariah Indonesia, serta perbaikan pertumbuhan ekonomi lokal *pasca-pandemi*. Kombinasi intervensi positif tersebut memungkinkan nasabah untuk tetap memprioritaskan dan menjaga kelancaran pembayaran kewajiban pembiayaan mereka, meskipun pada saat yang bersamaan harus menghadapi eskalasi kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok harian di Kota Medan.

Pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) terhadap Kredit Macet (NPF)

Hasil estimasi statistik untuk variabel Upah Minimum Kota (UMK) menunjukkan bahwa kebijakan penyesuaian upah minimum tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat rasio *Non-Performing Financing (NPF)* di Bank Syariah Indonesia Kota Medan. Nilai signifikansi yang dihasilkan mencatatkan angka sebesar 0,5947, yang berada jauh di atas ambang batas toleransi 0,05, sehingga hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini secara resmi ditolak. Secara konseptual, kenaikan UMK diproyeksikan dapat meningkatkan kapasitas penerimaan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat daya beli serta jaminan kelancaran finansial nasabah dalam melunasi angsuran pembiayaan, sehingga mampu menekan *NPF*. Namun, analisis empiris membuktikan bahwa pergeseran nominal UMK tidak secara otomatis memicu perbaikan kelancaran pengembalian dana, mengingat indikator penetapan upah tersebut tidak menyentuh seluruh lapisan nasabah penerima fasilitas pembiayaan pada sektor perbankan syariah secara merata.

Kondisi ini dapat dijelaskan oleh profil komposisi nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Medan, di mana portofolio penerima fasilitas pembiayaan tidak terbatas pada kelompok pekerja formal penerima upah minimum. Dikarenakan sebagian besar debitur merupakan pelaku usaha mikro, pedagang komersial, serta pekerja sektor informal yang tingkat pendapatannya berfluktuasi dan tidak terikat secara langsung oleh keputusan regulasi UMK. Oleh karena itu, kenaikan batas nominal UMK tidak serta-merta meningkatkan kapasitas arus kas seluruh nasabah. Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Sari dan Nugroho (2021), yang menyatakan bahwa kebijakan penyesuaian upah minimum tidak selalu berdampak positif secara langsung terhadap pemulihan kondisi keuangan masyarakat. Efektivitas dampak kenaikan UMK masih sangat bergantung pada faktor eksternal lainnya, seperti laju kenaikan harga barang konsumsi, kondisi lingkungan kerja, serta stabilitas perekonomian makro di wilayah tersebut.

Pengaruh Inflasi, Harga Kebutuhan Pokok, dan Upah Minimum secara Simultan terhadap Kredit Macet (NPF)

Pengujian secara simultan membuktikan bahwa kombinasi variabel inflasi, harga kebutuhan pokok, dan Upah Minimum Kota (UMK) berpengaruh signifikan terhadap rasio *Non-Performing Financing (NPF)* pada Bank Syariah Indonesia Kota Medan. Nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 179,4978, jauh melampaui nilai F_{tabel} sebesar 2,7694 dengan tingkat signifikansi 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis keempat secara resmi diterima. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun variabel independen tidak seluruhnya berpengaruh secara parsial, penggabungan ketiga variabel makro dan riil tersebut secara serentak sangat mampu memprediksi dinamika pergeseran *NPF*. Kualitas aset pembiayaan perbankan syariah pada hakikatnya tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi secara kompleks oleh efek simultan indikator ekonomi daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Putri dan Hidayat (2023) yang mengemukakan pengaruh simultan variabel ekonomi terhadap risiko kemacetan pembiayaan pada perbankan syariah.

Kekuasaan model ekonometrika dalam penelitian ini diperkuat oleh perolehan besaran nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9058. Angka ini mengandung arti bahwa sebesar 90,58% variasi pergeseran naik-turunnya rasio *NPF* pada PT Bank Syariah Indonesia di Kota Medan selama periode 2021 hingga 2025 mampu dijelaskan oleh interaksi variabel inflasi, harga kebutuhan pokok, dan UMK. Sementara itu, sisa variasi sebesar 9,42% dipengaruhi oleh variabel eksternal maupun internal lain di luar model, seperti tingkat bagi hasil, rasio efisiensi operasional (*BOPO*), maupun faktor tata kelola internal bank. Hasil analisis ini membuktikan pentingnya perhatian manajemen perbankan syariah terhadap fluktuasi ekonomi riil masyarakat. Pemantauan terhadap dinamika biaya hidup lokal menjadi pijakan krusial dalam menyusun strategi mitigasi risiko pembiayaan demi menjaga stabilitas dan kesehatan portofolio aset produktif perbankan syariah secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda, variabel harga kebutuhan pokok (X_2) terbukti menjadi variabel yang paling dominan dan paling memengaruhi rasio *Non-Performing Financing (NPF)* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Kota Medan selama periode 2021 hingga 2025. Dominansi ini ditunjukkan oleh perolehan nilai t_{hitung} sebesar 5,462988 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000 yang jauh berada di bawah taraf nyata 0,05. Sebaliknya, dua variabel independen lainnya, yaitu inflasi (X_1) dan Upah Minimum Kota (X_3), tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara parsial dengan perolehan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,8554 dan 0,5947. Hal ini membuktikan bahwa eskalasi biaya hidup dan pengeluaran pangan primer rumah tangga memberikan tekanan finansial yang

jauh lebih kuat serta berdampak langsung terhadap daya bayar angsuran pembiayaan nasabah dibandingkan dengan indikator makroekonomi agregat maupun penetapan batas upah minimum daerah (Rahman & Yusuf, 2024).

5. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 2021–2025 inflasi dan Upah Minimum Kota (UMK) tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Kota Medan. Sebaliknya, harga kebutuhan pokok menjadi variabel yang paling dominan karena berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Meskipun secara parsial hanya harga kebutuhan pokok yang berpengaruh, pengujian simultan membuktikan bahwa inflasi, harga kebutuhan pokok, dan UMK secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan NPF. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9058 menunjukkan bahwa 90,58% variasi NPF dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya sebesar 9,42% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrila. (2025). Pengaruh inflasi, suku bunga BI, FDR, CAR, dan BOPO terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) di bank komersial syariah 2016–2023 (Skripsi Sarjana, UIN Raden Intan Lampung). <https://repository.radenintan.ac.id/42001/>
- Akerlof, GA (1970). Pasar untuk "barang cacat": Ketidakpastian kualitas dan mekanisme pasar. *Jurnal Ekonomi Triwulanan*, 84(3), 488–500. <https://doi.org/10.2307/1879431>
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2025). Kota Medan dalam angka 2025. Badan Pusat Statistik Kota Medan. <https://www.bps.go.id>
- Creswell, JW, & Creswell, JD (2023). *Desain penelitian: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran* (edisi ke-6). Sage Publications.
- Friedman, M. (1957). *Teori fungsi konsumsi*. Princeton University Press.
- Irmayana. Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Kurs Rupiah terhadap Kredit Macet di Bank Komersial Syariah Periode 2017–2020. Skripsi Sarjana, UIN Raden Intan Lampung, 2022. <https://repository.radenintan.ac.id/17431/>
- Mubarok, F., Wibowo, M., Pradana, HD, & Yaacob, Z. (2026). Pengaruh guncangan makroekonomi, efisiensi operasional, dan risiko pembiayaan: Studi empiris NPF pada bank umum syariah di Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 22–42.
- Nasution, NE, Nasution, YSJ, & Nasution, MLI (2023). Analisis implementasi mikrofinans Islam dalam pengembangan usaha mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Aksara. *Jurnal Ilmiah Refleksi: Ekonomi, Akuntansi, Manajemen dan Bisnis*, 6(3), 660–671. <https://www.online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/44589>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 tentang penilaian kualitas aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2024). Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/833/KPTS/2024 tentang penetapan upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2025. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2025). Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia 2025. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2024-ID/index.html>
- Putri, R., & Hidayat, T. (2023). Pengaruh variabel makroekonomi terhadap masalah pembiayaan dalam perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Rahmadany, AN, Risfandy, T., & Harahap, B. (2023). Apa saja faktor penentu non-performing financing pada bank syariah pada masa Covid-19? *Tinjauan Bisnis* Sebelas Maret, 8(1), 61–69.
- Rahman, F., & Yusuf, M. (2024). Analisis faktor eksternal terhadap risiko pembiayaan bank syariah pasca pandemi. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 9(1), 61.
- Sari, D., & Nugroho, A. (2021). Dampak inflasi terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Islam*, 6(1), 30.
- Stiglitz, JE, & Weiss, A. (1981). Penjatahan kredit di pasar dengan informasi yang tidak sempurna. *The American Economic Review*, 71(3), 393–410.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (edisi ke-2). Alfabet.
- Thoyyibah, TH, & Amir, F. (2024). Pengaruh inflasi dan kemiskinan terhadap NPF pada bank-bank komersial Islam di Indonesia. *I-Finance: Jurnal Penelitian Keuangan Islam*, 10(2), 289–303. <https://doi.org/10.19109/acznrq12>